

---

**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Per Posisi Tanggal : 4 Januari 2018/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF  
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)  
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA PADANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MAHYELDI
2. Jabatan : CALON WALIKOTA
3. NHK : 41824

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>808.776.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 677 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 135.400.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.200.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1002 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.400.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 569 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 113.800.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/112 m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 127.176.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 434 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 86.800.000		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>176.475.000</b>
1. MOBIL, KIJANG INNOVA G\TOYOTA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
3. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.475.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>437.870.131</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>265.392.336</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	<b>140.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>644.714.646</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>1.183.798.821</b>

---

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
5. Pengumuman ini disahkan di Jakarta tanggal 7 Maret 2018.